

Mobil Dinas Zulfadhli Segera Dieksekusi



FOTO: DUARNI

Pontianak, BERKAT.

Kepala Satpol PP Provinsi Kalbar, TT Nyarong, menegaskan mobil dinas milik mantan Ketua DPRD Kalbar periode 2004-2009, Ir. Zulfadhli, akan segera dieksekusi.

Ini dilakukan, menurut Nyarong karena sesuai dalam LHP BPK-RI yang menemukan asset daerah, yaitu beberapa kendaraan dinas milik Pemprov Kalbar yang hingga saat ini masih dipegang oleh pejabat lama.

"Kendaraan jenis sedan Toyota Camry 2400 AT itu sampai saat ini masih di tangan mantan Ketua DPRD Kalbar,

TT NYARONG

Zulfadhli dan akan kita eksekusi jika sampai waktu yang ditetapkan tidak juga dikembalikan," kata Nyarong kepada wartawan, usai menghadiri rapat Pari

LANJUTAN BACA HAL 11

Mobil Dinas Zulfadhli Segera Dieksekusidari Hal 1

purna Perubahan APBD Tahun anggaran 2011 di Gedung DPRD Kalbar, Senin (3/10).

Nyarong menjelaskan, untuk kendaraan dinas sendiri, tidak saja mobil Zulfadhli yang akan dieksekusi, namun ada empat kendaraan lain juga akan dilakukan penarikan paksa.

"Untuk asset Pemprov terkait kendaraan dinas ada lima termasuk mobil Zulfadhli, semua akan kita eksekusi sesuai dengan UU kalau sampai tiga kali surat yang dilayangkan tidak digubris oleh pemegang kendaraan tersebut," jelasnya.

Pasca audit oleh pihak BPK-RI Perwakilan Kalbar, Pemerintah Provinsi Kalbar masih terus menginventarisir persoalan asset sehingga dapat diselesaikan sesuai apa yang menjadi temuan BPK-RI, termasuk mobil dinas milik Zulfadhli.

Kemudian Kepala Badan Biro Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Setda Provinsi Kalbar, Christianus Lumano, menjelaskan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI beberapa waktu lalu, pihak pemerintah provinsi masih dalam tahap pengkajian dan inventarisir.

"Hal ini masih kita pelajari apa yang menjadi LHP BPK RI termasuk persoalan kendaraan dinas. Semua masih kita serahkan kepada masing-masing SKPD, kalau tiga kali berturut-turut surat permintaan mobil tidak digubris, kami bersama Satpol PP akan segera mengeksekusi. Tapi saya yakin dengan kesadarannya, Zulfadhli sendiri yang akan mengembalikan mobil tersebut kepada Pemprov Kalbar," papar Lumano.

Sementara itu Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Bambang Soerachmat, SH, menjelaskan Zulfadhli saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kalbar pernah menyurati pemerintah provinsi pada 3 September 2009 lalu dengan isi surat mengajukan permohonan hibah/pinjam pakai kendaraan, karena merasa masih memerlukan kendaraan tersebut pasca memangku jabatan selaku Pimpinan

DPRD Kalbar. Namun permintaan Zulfadhli ditolak Pemprov melalui surat Plt Sekretaris Daerah Kalbar, MH Munsin, tertanggal 3 April 2010. Dalam surat tersebut, melalui Plt Sekda menjelaskan, dengan berakhirnya masa bhakti pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD maupun kendaraan operasional yang dipinjamkan kepada Anggota DPRD harus dikembalikan kepada Pemda Cq Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/barang.

"Paling lambat satu bulan sejak tanggal pemberhentian. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 024/3341/SJ. Sebelumnya Sekretaris DPRD juga sudah menyurati Zulfadhli pada 1 Oktober 2009 (Nomor 028/369/Set.DPRD-A), Sekretaris DPRD juga meminta agar yang bersangkutan mengembalikan kendaraan dinas operasional pimpinan DPRD tersebut," papar Bambang lagi.

Setelah surat pertama dilayangkan dan tidak digubris, Bambang melanjutkan, surat pemberitahuan kedua kembali dilayangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 dengan nomor surat 028/490/Set.DPRD-A. Dan surat terakhir dilayangkan pada 28 April 2010 tentang penarikan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD periode 2004-2009. Dan di tahun 2011 ini, Bambang menambahkan sesuai dengan hasil laporan BPK RI, atas mobil dinas yang saat ini masih dipegang oleh Zulfadhli, ia selaku Sekwan DPRD Kalbar hanya menginventarisir data aset Pemprov sesuai dengan laporan BPK, dan salah satu aset yang ada satu mobil dinas masih berada di tangan Zulfadhli.

"Namun semua dokumen sudah kami berikan kepada Pemprov Kalbar untuk segera ditindaklanjuti. "Karena kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD itu sudah tidak memiliki nomor polisi, nomor polisi KB 4 sekarang terdaftar dan dipergunakan atas nama kendaraan Ketua DPRD Kalbar periode 2009-2014," jelas Bambang. (aca)